

## **PENGARUH INVESTASI, PAJAK DAERAH DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI RIAU**

**Sufnirayanti<sup>1</sup>, Sri Wahyuni Zanra<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau

<sup>1</sup>STIE MAHAPUTRA Pekanbaru

email. [sufnirayanti@umrah.ac.id](mailto:sufnirayanti@umrah.ac.id), [sri.zanra@gmail.com](mailto:sri.zanra@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine and examine the effect of investment. Local taxes and population on the economic growth of Riau Province in 2013-2021. The data used in this study is secondary data, in the form of time series. The data source used in this study comes from the Central Bureau of Statistics (BPS). This study uses multiple linear regression analysis and uses Statistical Tests and Classical Assumptions Tests. The data is processed using the Eviews 9 application. The results of this study indicate that investment and local taxes have a positive and significant effect on economic growth in Riau Province, while population size does not have a significant effect on economic growth in Riau Province.*

**Keywords:** investment, local taxes, population, economic growth.

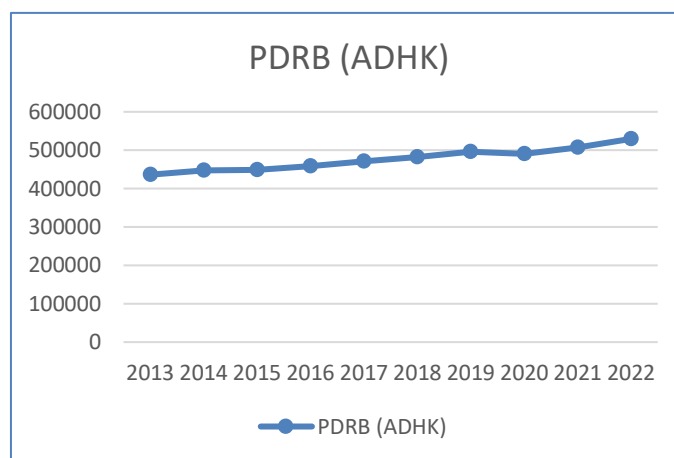
### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh investasi. Pajak daerah dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada tahun 2013-2021. Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder, dalam bentuk time series. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan menggunakan Uji Statistik dan Uji Asumsi Klasik. Data diolah menggunakan aplikasi Eviews 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi dan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.

**Kata Kunci:** investasi, pajak daerah, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi.

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan ekonomi dalam sebuah negara juga mengukur prestasi dan perkembangan perekonomian pada periode tertentu dan sebagai indikator untuk menilai keberhasilan ekonomi suatu negara atau daerah. Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.



**Gambar 1. Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2022 (milyar Rupiah)**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, 2023*

Pada tabel 1.1, diketahui bahwa PDRB atas dasar harga konstan di Provinsi Riau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2013 sebesar 436.187,51 milyar rupiah, Pada Tahun 2014 PDRB Provinsi Riau meningkat sebesar 2,70% menjadi 447.968,78 milyar rupiah, Pada Tahun 2015 PDRB Provinsi Riau meningkat sebesar 0,23% menjadi 448.991,96 milyar rupiah, Pada Tahun 2016 PDRB Provinsi Riau meningkat sebesar 2,18% menjadi 458.769,34 milyar rupiah, Pada Tahun 2017 PDRB Provinsi Riau meningkat sebesar 2,66% menjadi 470.983,51 milyar rupiah, Pada Tahun 2018 PDRB Provinsi Riau meningkat sebesar 2,35% menjadi 482.064,63 milyar rupiah dan pada tahun 2019 naik menjadi 495.607,05 milyar rupiah namun pada Tahun 2020 PDRB Provinsi Riau menurun sebesar 1,13% menjadi 489.995,75 milyar rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 PDRB di Provinsi Riau kembali meningkat sebesar 3,36% menjadi 506.471,91 milyar rupiah. Peningkatan dapat terjadi karena pendapatan daerah yang terus bertambah pada setiap tahunnya.

Perkembangan investasi yang merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dimana investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tantangan pelaksanaan investasi di Indonesia saat ini, salah satunya adalah dengan pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia. Sejak tahun 2001 era otonomi daerah di Indonesia dimulai, dimana semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. tentang Pemerintah Daerah dan kemudian diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sementara itu, sumber pendanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dimana makna penting pengaturan tersebut adalah bahwa ada sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Berikut realisasi investasi di Provinsi Riau Tahun 2013-2021:

**Tabel 1 Realisasi Investasi di Provinsi Riau Tahun 2013-2021**

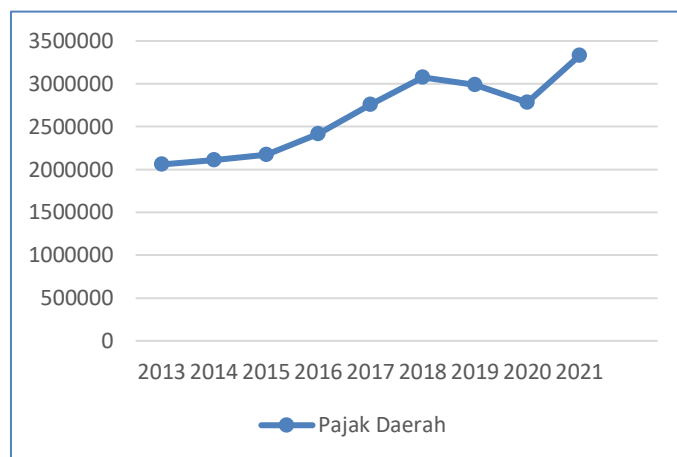
No	Tahun	Investasi
1	2013	Rp 4,874,268,500,000
2	2014	Rp 7,707,546,000,000
3	2015	Rp 9,943,040,000,000
4	2016	Rp 6,613,745,100,000
5	2017	Rp 24,843,234,150,000
6	2018	Rp 22,896,990,000,000
7	2019	Rp 41,802,200,000,000
8	2020	Rp 49,640,781,480,000
9	2021	Rp 53,050,240,000,000

*Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Riau, 2023*

Dari tabel di atas terlihat bahwa investasi di Provinsi Riau selalu meningkat secara pesat dimana pada Tahun 2013 jumlah investasi sebesar 4.874.268,5 juta rupiah namun pada tahun 2021 meningkat menjadi 53.050,24 milyar rupiah. Hal ini tentunya menjadi harapan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah dimana tidak dikenal lagi pembagian daerah sebagai daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Pemerintah daerah hanya dibedakan menjadi daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, tidak ada lagi daerah kotamadya. Sebagaimana halnya pemerintah pusat yang menarik pajak untuk membiayai kegiatannya, maka pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, disamping sumber-sumber pendapatan lainnya.(Darwin, 2010).Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.(Darise, 2006). Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang tentunya memiliki pengaruh terhadap pendapatan domestik regional daerah.

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Riau dapat dilihat pada grafik berikut:



**Gambar 2. Pajak Daerah Provinsi Riau Tahun 2013-2022 (dalam Jutaan Rupiah)**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, 2023*

Dari grafik di atas terlihat bahwa pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Riau berfluktuasi setiap Tahunnya khususnya Pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2019 jumlah Pajak daerah yang dipungut sebesar 2.989.749,79 juta rupiah sedangkan pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 2.783.421,36 juta rupiah.

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Alasannya sederhana, karena penduduk merupakan sumber daya manusia yang partisipasinya sangat diperlukan agar pelaksanaan hasil-hasil perencanaan dapat berjalan dengan baik. Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta usaha membangun suatu perekonomian karena penduduk menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan tenaga kerja usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi , Namun di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan efek buruk bagi pertumbuhan ekonomi. Berikut jumlah Penduduk Provinsi Riau dari Tahun 2013- Tahun 2022

**Tabel 2 Jumlah Penduduk di Provinsi Riau Tahun 2013-2021.**

No	Tahun	Jumlah penduduk (jiwa)
1	2013	6.033.268
2	2014	6.188.442
3	2015	6.344.402
4	2016	6.500.971
5	2017	6.657.911
6	2018	6.814.909
7	2019	6.971.745
8	2020	6.394.087
9	2021	6.493.603
10	2022	6.614.384

*Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, 2023*

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Riau selalu meningkat dari tahun 2013-2022. Tahun 2013 jumlah penduduk Provinsi Riau sebesar 6.033.268 jiwa dan tahun 2022 jumlah penduduk Provinsi Riau naik menjadi 6.614.383 jiwa. Jumlah penduduk menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu daerah. Daerah yang memiliki penduduk besar akan menjadi peluang yang besar untuk bisa memasarkan hasil-hasil produksinya. Dengan tersedianya tenaga kerja yang melimpah, akan membuat jumlah produksi semakin meningkat. Namun disisi lain, masalah yang akan muncul dari bertambahnya jumlah penduduk apabila tidak diikuti dengan perluasan lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran dan permasalahan lain di setiap daerahnya.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Pertumbuhan ekonomi juga berorientasi pada peningkatan pendapatan riil biasanya dilakukan oleh negara-negara sedang berkembang dengan tujuan untuk memecahkan berbagai masalah yang terjadi di negara sedang berkembang seperti pengangguran dan kemiskinan. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara terus menerus maka dimungkinkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat (Sukirno, 2012).

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan ekonomi di suatu negara atau daerah, menunjukkan besar kecilnya ekonomi dalam setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah tercipta dilihat dari peran pemerintah yang sangat berpengaruh, hal ini sebab peran swasta belum cukup berpengaruh dalam hal pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari GNP.

Salah satu indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin tinggi nilai PDRB di suatu daerah, maka potensi sumber pendapatan pemerintah daerah akan semakin besar (Simanjuntak, 2001). Menurut Adisasmita (2010) indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

### **Teori Keynes**

Teori Keynes adalah teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonomi John Maynard Keynes pada abad 20. Teori ini menjelaskan tentang suatu ekonomi campuran, baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian yang sedang lesu. Selain itu kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan inflasi. Dalam teori tersebut inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Dalam pandangan ini, inflasi adalah proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok – kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang – barang selalu melebihi jumlah barang – barang yang tersedia (timbulnya apa yang disebut *inflationary gap*).

### **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto dalam suatu wilayah (Adisasmita, 2013:4). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka ini menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian

### **Investasi**

Investasi merupakan tambahan terhadap stok kapital. Pengertian kapital secara fisik adalah seluruh barang modal yang digunakan dalam proses produksi seperti mesin, bangunan, kendaraan dan peralatan serta lainnya. Kapital adalah harta tetap (*fixed assets*) suatu badan usaha. Secara umum kapital sering disebut sebagai *Gross Capital Stocks* merupakan akumulasi/ penumpukan pembentukan modal bruto dari tahun ke tahun yang digunakan untuk menghasilkan produk baru. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang (Sukirno, 2012:121)

Investasi merupakan salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Bagi suatu negara tidak hanya untuk memaksimalkan output, tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan juga distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi. Tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan baru. Adanya investasi juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan dari negara maju ke negara berkembang (Pujoalwanto, 2014:164)

### **Pajak Daerah**

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009)

### **Jumlah Penduduk**

Berdasarkan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap dihitung per tiga orang. Badan Pusat Statistik Indonesia memiliki beberapa sumber data kependudukan, yaitu hasil sensus, survei, dan registrasi penduduk

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis deskriptif dan metode analisis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dengan pertimbangan data ini mempunyai validitas data yang dijamin oleh pihak pembuat sehingga

handal untuk digunakan dalam penelitian. Metode analisis deskriptif digunakan untuk membuat gambaran mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 2013-2021 yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto. Metode analisis kuantitatif digunakan untuk melihat dan menganalisis sejauh mana pengaruh variabel bebas (*independen*) terhadap variabel terikat (*dependen*).

## HASIL PENELITIAN

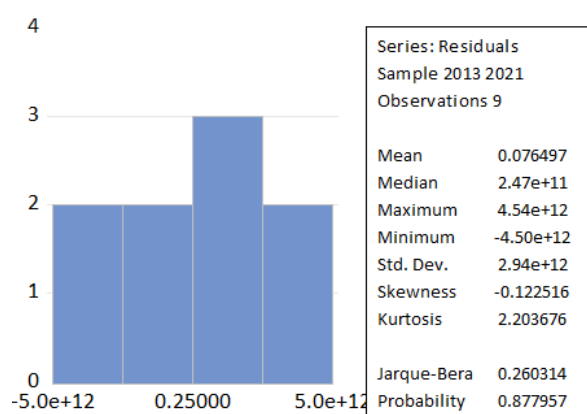
Penelitian yang dilaksanakan menggunakan data time series yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Dari data yang telah peneliti peroleh tersebut, digunakan untuk melihat pengaruh jumlah penduduk, inflasi, dan kemiskinan terhadap pengangguran. Dasar perhitungan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi dan dalam perhitungan analisis digunakan program EvIEWS 9

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

**Grafik 3. Hasil Uji Normalitas**



Sumber: Data Olahan, 2023

Dari hasil estimasi di atas, dapat dilihat bahwa histogram residual model regresi tersebut tidak berbentuk lonceng maka ketiga variabel tersebut mempunyai distribusi yang normal. Sedangkan jika dilihat dari nilai probabilitas sebesar  $0,877957 > \alpha 5\%$  maka data tersebut berdistribusi normal.

#### 2. Uji Multikolineritas

Hasil uji multikolineritas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factors (VIF) dari variabel penelitian. Berikut nilai VIF masing masing variabel:



**Tabel 3 Hasil Uji Multikolineritas**

Variance Inflation Factors

Date: 03/01/23 Time: 10:54

Sample: 2013 2021

Included observations: 9

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
INVESTASI	0.019543	11.86741	4.168451
PAJAK	58.40732	270.7660	7.200420
PENDUDUK	5.37E+13	1473.670	2.701319
C	1.32E+27	857.5448	NA

*Sumber: Data Olahan, 2023*

Berdasarkan hasil pengolahan di atas, dapat dilihat bahwa nilai VIF dari variabel bebas yaitu nilai VIF investasi (X1) sebesar 4,168451, nilai VIF pajak daerah (X2) sebesar 7,200420 dan nilai VIF jumlah penduduk (X3) sebesar 2,701319. Maka dari itu nilai VIF dari ketiga variabel bebas tersebut kurang dari 10.

### 3. Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 Hasil Uji Heterokedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.856466	Prob. F(3,5)	0.5206
Obs*R-squared	3.055010	Prob. Chi-Square(3)	0.3832
Scaled explained SS	0.567476	Prob. Chi-Square(3)	0.9038

*Sumber: Data Olahan, 2023*

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan uji white, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas Chi Square(7) pada Obs\*Rsquared sebesar 0.3832 >  $\alpha$  5% maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 4. Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan Breusch-Godfrey adalah sebagai berikut:

**Tabel 5 Hasil Uji Heterokedastisitas**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.504711	Prob. F(2,3)	0.6472
-------------	----------	--------------	--------



*Sumber: Data Olahan, 2023*

Dari tabel 5 diatas diperoleh nilai Prob. Chi-Square (yang Obs\*R-squared) sebesar  $0,3221 > \alpha (0,05)$ . yang berarti asumsi tidak terdapat autokorelasi terpenuhi atau model persamaan regresi tidak mengandung masalah autokorelasi

## Hasil Pengujian Statistik

Hasil dari analisis regresi tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 6 Hasil Analisis Regresi**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INVESTASI	0.666723	0.139795	4.769304	0.0050
PAJAK	21.88295	7.642468	2.863335	0.0353
PENDUDUK	10951881	7324719.	1.495195	0.1951
C	3.26E+14	3.63E+13	8.975329	0.0003
R-squared	0.985368	Mean dependent var	4.71E+14	
Adjusted R-squared	0.976588	S.D. dependent var	2.43E+13	
S.E. of regression	3.72E+12	Akaike info criterion	61.02724	
Sum squared resid	6.91E+25	Schwarz criterion	61.11489	
Log likelihood	-270.6226	Hannan-Quinn criter.	60.83808	
F-statistic	112.2362	Durbin-Watson stat	2.661821	
Prob(F-statistic)	0.000052			

*Sumber: Data Olahan, 2023*

### 1. Hasil Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 6 diatas, dapat pula dilihat nilai koefisien masing masing variable bebas yang diturunkan ke dalam persamaan regresinya, sebagai berikut :

$$Y = 3,26 + 0,66723X_1 + 21,88295 X_2 + 10.951.881 X_3$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut sebagai berikut :

- Nilai koefisien variabel investasi sebesar 0,66723, mengandung arti bahwa jika investasi mengalami kenaikan 1 juta rupiah maka pertumbuhan ekonomi yang di proxy dengan PDRB ADHK mengalami kenaikan sebesar 0,66723 juta.
- Nilai koefisien variabel pajak daerah sebesar 21,88295, mengandung arti bahwa setiap kenaikan pajak daerah sebesar 1 juta rupiah maka pertumbuhan ekonomi yang di proxy dengan PDRB ADHK akan meningkat sebesar 21,88295 juta rupiah.
- Nilai koefisien variabel jumlah penduduk sebesar 10.951.881, mengandung arti bahwa jika tenaga kerja meningkat 1 jiwa maka pertumbuhan ekonomi yang di proxy dengan PDRB ADHK mengalami kenaikan sebesar 10.951.881 rupiah.

## 2. Uji Parsial (Uji t)

Dari hasil uji signifikansi parsial (uji t) yang dapat dilihat pada tabel 6 diatas, dengan  $\alpha = 5\%$  dan nilai ttabel (0,05/2 ; 10-3) adalah 2,447, maka dapat diketahui apakah terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial (sendiri-sendiri) sebagai berikut :

- a. Nilai thitung variabel investasi adalah 4.769304 yang berarti thitung (4.769304)  $>$  ttabel (2,447) dengan tingkat signifikan (0,0050)  $<$   $\alpha$  (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau
- b. Nilai thitung variabel pajak daerah adalah 2,863335 yang berarti thitung (2,863335)  $>$  ttabel (2,447) dengan tingkat signifikan (0,0353)  $>$   $\alpha$  (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau
- c. Nilai thitung variabel jumlah penduduk adalah 1,495195 yang berarti thitung (1,495195)  $<$  (2,447) dengan tingkat signifikan (0,1951)  $>$   $\alpha$  (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.

## 3. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh simultan variabel-variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat (dependent). Berdasarkan Tabel 6 hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai F-Statistik yang diperoleh adalah sebesar 112.2362 dengan probabilitas sebesar 0,000052. Ini berarti nilai probabilitas F-Statistik yang diperoleh lebih kecil dari Alpha yang ditetapkan ( $0,000052 < 0,05$ ) sehingga menolak  $H_0$  yang artinya investasi, pajak daerah dan jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

## 4. Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 6 di atas, diperoleh nilai Adjusted R-squared atau  $R^2$  Adj sebesar 0,976588 artinya secara keseluruhan variabel bebas dalam persamaan tersebut yang terdiri dari variabel investasi, pajak daerah dan jumlah penduduk mampu menjelaskan variasi variabel pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau sebesar 97,66%, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan tersebut.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial ditemukan bahwa Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Hal ini membuktikan bahwa faktor investasi merupakan faktor penting dalam menentukan naik turunnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Dari nilai koefisien regresinya, variabel investasi menunjukkan angka yang relatif besar, ini mengindikasikan bahwa kontribusi investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau sudah optimal. Hal ini karena mulai kondusifnya iklim investasidan giatnya pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan jumlah investasi di Provinsi ini dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Semakin banyak investor yang menginvestasikan dananya, maka semakin banyak pula sumber modal yang diperoleh untuk membangun dan menumbuhkan perekonomian suatu daerah.

### **Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial ditemukan bahwa Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Dengan adanya PAD khususnya dari sektor Pajak Daerah maka perekonomian dan pembangunan di suatu daerah akan berjalan dengan lancar serta dapat mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu daerah, selain penerimaan pemerintah daerah mengalami peningkatan pendapatan masyarakat juga tinggi yang akan menyebabkan makin meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau. Secara umum meningkatnya usaha Hotel, Restaurant, Hiburan di daerah memberikan dampak positif. Selain penerimaan daerah mengalami peningkatan pendapatan masyarakat juga meningkat.

### **Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dari hasil regresi uji t, dapat diketahui bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk tidak diimbangi dengan dibukanya lapangan pekerjaan. Jumlah penduduk yang banyak tidak meningkatkan produktivitas akan tetapi meningkatkan pengangguran karena penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan perekonomian Provinsi Riau terus mengalami pertumbuhan secara signifikan setiap tahunnya.
2. Investasi Pajak daerah dan Jumlah penduduk terbukti secara simultan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau
3. Secara parsial, investasi dan pajak daerah merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Namun, berbeda halnya jumlah penduduk yang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andri Devita; Arman Delis; Junaidi. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*. Jurnal Ilmiah Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
- Arsyad, 1999, *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Riau, 2023. Provinsi Riau Dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik. Pekanbaru. Riau
- Badan Pusat Statistik. Berbagai Tahun. BPS Provinsi Riau
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE. Yogyakarta.
- <https://ojs.jurnalrekaman.com/index.php/rekaman>



Darise, Nurlan. 2006, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT. Indeks Kelompok. Gramedia Anggota IKAPI, Jakarta.

Darwin, 2010, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta; Mitra Wacana Media.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Riau, 2023. *Buku Kajian Investasi Provinsi Riau Tahun 2023*. Pekanbaru

Mankiw, N.Gregory (2000). *Makro Ekonomi Edisi ke Enam*. Jakarta: Erlangga

Pujoalwanto, Basuki .2014. *Perekonomian Indonesia, Tinjauan Historis, Teoritis, Dan Empiris*, Yogyakarta,

Pujoalwanto, Basuki. 2014. *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Simanjuntak, Payaman. J. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Sukirno, Sadono. 2012. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1*. Erlangga

Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009